

DAFTAR BACAAN

- Ashidiqqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Black's Law Dictionary with Pronunciation, Minn West Publishing co, St. Paul, 1983
- Charada S., *Ujang Disiplin Ilmu Hukum : Sebuah Pengembaraan dalam Memahami Fondasi, Struktur, Arsitektur & Kesejarahan Ilmu Hukum*, Bungo Abadi, Bandung, 2009
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016
- Djaja, Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Hamdan, Zoelva, *Impeachment Presiden alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945*, cet. II, Konstitusi Press, Jakarta, 2014
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Henry Campbell, *Black's law Dictionary*, West Publishing, 1990
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1986
- Husein Alatas, Syed, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983
- Fajar ND, Yulianto Achmad, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2013
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Logemann, J.H.A, *Over de theorie van een stellig Staatsrecht (Terjemahan Makatutu dan R. Pangkerego)*, Ikhtiar Baru-van Hoeve), Jakarta, Tanpa tahun

- M. Gaffar, Janedr, *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, 2012
- M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Philipus, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Mas'ud M, Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Penerbitan Univ.Muhammadiyah Malang (UMM). Malang
- Mahmud Marzuki, Peter , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- _____ , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 2013
- Mustari Pide, Andi, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad Xxi*, Jakarta, Radar Jaya Pratama, 1999
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Prayudi, Guse, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962
- Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta 1999
- Andyanto, Hidayat, Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal, Jendela Hukum” Fakultas Hukm Unija. Volume 3 Nomor 1 April 2016

Aqil Al Halimi , Zen, Hananto Widodo, Analisis Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Sebagai Terdakwa Tindak Pidana (Studi Kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), *Jurnal*, Jurnal Novum, diakses pada Jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/25522 didownload pada 6 Februari 2019

Azmi, Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal*, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019

Charda S, Ujang, Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik (*Potential For Abuse Of Authority BY The Administrative Officers Of The State Of Public Polucy Making And Exescution*), *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 02 September 2012

Kemala Sintha, Dyah, Implikasi Penetapan Status Tersangka Bagi Bupati Terpilih Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal*, Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Ismail MZ, H. Kajian Yuridis Tentang Peran, Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ssesuai Dengan Prinsip – Prinsip Demokrasi, *Jurnal*, Jurnal GaneÇ Swara Vol. 11 No.2 September 2017, Mataram

Rohkim, Abdul, Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara kesejahteraan (*Welfare State*), *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Unisma, ISSN: 0854-7254, Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013

Ropii, Imam, Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif), *Jurnal*, S A S I V o l . 2 3 N o . 2 , J u l i - D e s e m b e r 2 0 1 7, Fakultas Hukum Universitas Pattimurap-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961

Sulardi, Tri Sulistyaningsih, Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif, *Jurnal*, Media Hukum, VOL.24 NO.1 / JUNI 2017, hlm 28

O.S. Hiariej, Eddy Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, “Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada”, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta

Wasahua, Idris, Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah karena Melakukan Tindak Pidana (Tinjauan Yuridis Atas Pasal 83 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), *Jurnal*, Lex Journalica Volume 14 Nomor 2, Agustus 2017

Widyastuti, Yeni, Mendorong Akuntabilitas Birokrasi Pejabat Publik Melalui *Ethics Leadership*, *Jurnal*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 ISBN: 978-602-96848-2-7 LAB-ANE FISIP Untirta

Ash Siddiqi, Hasbhi Analisis Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Hukumnya Dalam Perpektif Economic Analysis Of Law, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Pratikno, ”Demokrasi dalam Pilkada Langsung”, *Makalah*, Sarasehan Menyongsong Pilkada Langsung, IRCOS-FNSt, Hotel Saphir, Yogyakarta, 25-26 Januari 2005

<http://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/> Diakses pada 27 April 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/02/15462161/kpu-ingatkan-kepala-daerah-dilarang-jadi-ketua-tim-kampanye> diakses pada 1 Mei 2019

<https://www.liputan6.com/pileg/read/3917326/jelang-pemilu-mendagri-larang-kepala-daerah-ke-luar-negeri> diakses pada 1 Mei 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ee65520a30b/sembari-membandingkan--yuk-tengok-metamorfosis-pemberhentian-kepala-daerah> diakses pada 1 Februari 2019

<https://gurupkn.com/undang-undang-yang-mengatur-pemerintahan-daerah> diakses pada 12 Februari 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dbe81ce35e9/tata-cara-penggantian-jika-kepala-daerah-dan-wakilnya-tersandung-korupsi/> diakses pada 12 Februari 2019

<https://www.liputan6.com/news/read/3574082/mendagri-kepala-daerah-berstatus-tersangka-akan-tetap-dilantik> diakses pada 12 Februari 2019

<https://antikorupsi.org/id/news/kemendagri-jangan-nekat-lantik-tersangka-korupsi> diakses pada 14 Februari 2019

Redaktur Tempo, “Pejabat Bupati Gunung Mas Dilantik”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/31/058549888/Pejabat-Bupati-Gunung-Mas-Dilantik>, diakses pada 15 Februari 2019

Redaktur Detik News, “Dituntut 6 Tahun Penjara Hambit Bintih Pun Sulit Menerimanya”, <http://news.detik.com/read/2014/02/27/133935/2510199/10/dituntut-6-tahun-penjara-hambit-bintih-siapa-pun-sulit-menerimanya#>, diakses pada 15 Februari 2019

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/31/bupati-terpilih-gunung-mas-hambit-bintih-batal-dilantik> diakses pada 15 Februari 2019

<https://news.detik.com/berita/1892213/pelantikan-bupati-dan-wabup-mesuji-digelar-di-rutan> diakses pada 16 Februari 2019